



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI RIAU
DINAS KEBUDAYAAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025

Nomor : 000.7.2.8/DISBUD-Sekre/2026/33

Tanggal : 25 Februari 2026

Melestarikan WARISAN BUDAYA



Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 194 Tangkerang-Pekanbaru-Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sempena penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang kebudayaan. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Selain capaian kinerja tahun 2025, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Tahun 2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan 4 (empat) program pembangunan kebudayaan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan, namun tantangan pembangunan di bidang kebudayaan masih banyak bahkan memerlukan kerja

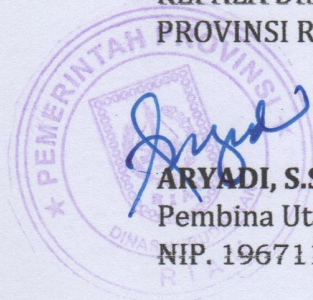
kerja lebih keras pada tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam bidang kebudayaan selama tahun 2025. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang kebudayaan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Pekanbaru, 25 FEBRUARI 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,



ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<u>KATA PENGANTAR</u>	I
<u>DAFTAR ISI</u>	III
<u>DAFTAR TABEL</u>	IV
<u>DAFTAR GRAFIK</u>	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR LAMPIRAN VII	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Strukur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	12
1.4 Aspek Strategis Dinas Kebudayaan.....	13
1.5 Permasalahan utama.....	13
1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	20
2.3 Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	22
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Langkah Strategis	34

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1	<i>Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin.....</i>	10
1.2	<i>Klasifikasi Pegawai menurut Eselon.....</i>	10
1.3	<i>Klasifikasi Pegawai menurut Golongan.....</i>	10
1.4	<i>Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal.....</i>	10
1.5	<i>Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu.....</i>	11
1.6	<i>Klasifikasi Tenaga Pendukung/Non PNS.....</i>	11
2.1	<i>Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Kebudayaan Provinsi Riau</i>	17
2.2	<i>Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan</i>	18
2.3	<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2025</i>	20
3.1	<i>Skala Nilai Peringkat Kerja</i>	23
3.2	<i>Capaian Kinerja Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi.....</i>	24
3.3	<i>Kinerja Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan.....</i>	25
3.4	<i>Capaian Indikator Nilai Ekspresi Budaya</i>	27
3.5	<i>Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Ekspresi Budaya</i>	29
3.6	<i>Capaian Indikator Nilai Warisan Budaya</i>	30
3.7	<i>Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Warisan Budaya.....</i>	33
3.8	<i>Capaian Indikator Nilai Sakip</i>	34
3.9	<i>Rincian Hasil Evaluasi Tahun 2023 dan 2024</i>	34
3.10	<i>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2025.....</i>	36
3.11	<i>Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....</i>	37
3.12	<i>Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2025.....</i>	39
4.1	<i>Rekapitulasi Tingkat Pencapaian IKU Selama Tahun 2023</i>	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1.1	<i>Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau</i>	9
1.2	<i>Struktur Organisasi UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya</i>	9

DAFTAR GRAFIK

Grafik

Halaman

3.1	<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Ekspresi Budaya Dengan Tingkat Nasional.....</i>	29
3.2	<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Warisan Budaya Dengan Tingkat Nasional</i>	32
3.3	<i>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dinas Kebudayaan Tahun 2025</i>	36
3.4	<i>Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2024</i>	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*
2. *Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025*
3. *Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Tahun 2025*
4. *Formulir Rencana Kinerja Tahunan Di Dinas Kebudayaan Tahun 2025*
5. *Formulir Rekapitulasi Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025*
6. *Formulir Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025*
7. *Formulir Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025*
8. *Formulir Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan Tahun 2025*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.

Pembangunan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka peningkatan sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup, tercapainya suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab secara harmonis dalam berkehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Strukur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

A. Kelembagaan

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diresmikan pada tanggal 13 Februari 2017. Sesuai dengan perkembangan

penataan Pemerintah Daerah maka dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Diplomasi dan Promosi Budaya;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Diplomasi dan Promosi Budaya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Diplomasi dan Promosi Budaya;
4. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik

daerah, serta kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kebudayaan;
2. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Bahasa dan Seni

Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan tugas yang terkait dengan bahasa dan sastra, kesenian, dan seni media. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Bahasa dan Seni;
2. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Bahasa dan Seni;
3. Membagi tugas, pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Bahasa dan Seni

4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Bahasa dan Seni dengan perangkat daerah terkait;
5. Melaksanakan upaya pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Objek Pemajuan Kebudayaan pada Bidang Bahasa dan Seni
6. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Bahasa dan Seni; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pelestarian Adat dan Tradisi, Nilai Budaya, Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
2. Melaksanakan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Objek pemajuan kebudayaan pada bidang pelestarian adat dan nilai budaya;
3. Membagi tugas, pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
4. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dengan perangkat daerah terkait;
6. Fasilitasi dan koordinasi proses pengakuan, penetapan warisan budaya tak benda di tingkat nasional dan Internasional;

7. Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai luhur budaya melayu dan masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Provinsi;
8. Pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan;
9. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional:

5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sejarah, pelestarian cagar budaya, dan permuseuman. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
3. Membagi tugas, pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
4. Memberikan Rekomendasi membawa Cagar Budaya keluar daerah Provinsi;
5. Memberikan Rekomendasi terkait aktifitas pada Objek Cagar Budaya Tingkat Provinsi;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan perangkat daerah terkait;

7. *Melaksanakan dan/atau Memfasilitasi Upaya Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Nilai kesejarahan, cagar budaya dan Permuseuman;*
8. *Melaksanakan dan/atau Memfasilitasi Juru Pelihara Cagar Budaya tingkat Provinsi;*
9. *Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; dan*
10. *Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.*

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional:

6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;

Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya menyelenggarakan tugas yang terkait dengan diplomasi budaya, pengembangan teknologi budaya, publikasi dan promosi budaya. Untuk melaksanakan tugas Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. *Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;*
2. *Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;*
3. *Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dengan perangkat daerah terkait;*
4. *Melaksanakan pengelolaan Publikasi, Pendokumentasian, Promosi dan Pengembangan Teknologi Budaya Melayu Riau pada Dinas Kebudayaan;*
5. *Melaksanakan Diplomasi Budaya Dalam dan Luar Negeri;*
6. *Melaksanakan Pembinaan Budaya terkait pemberian Anugerah Kebudayaan;*

7. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

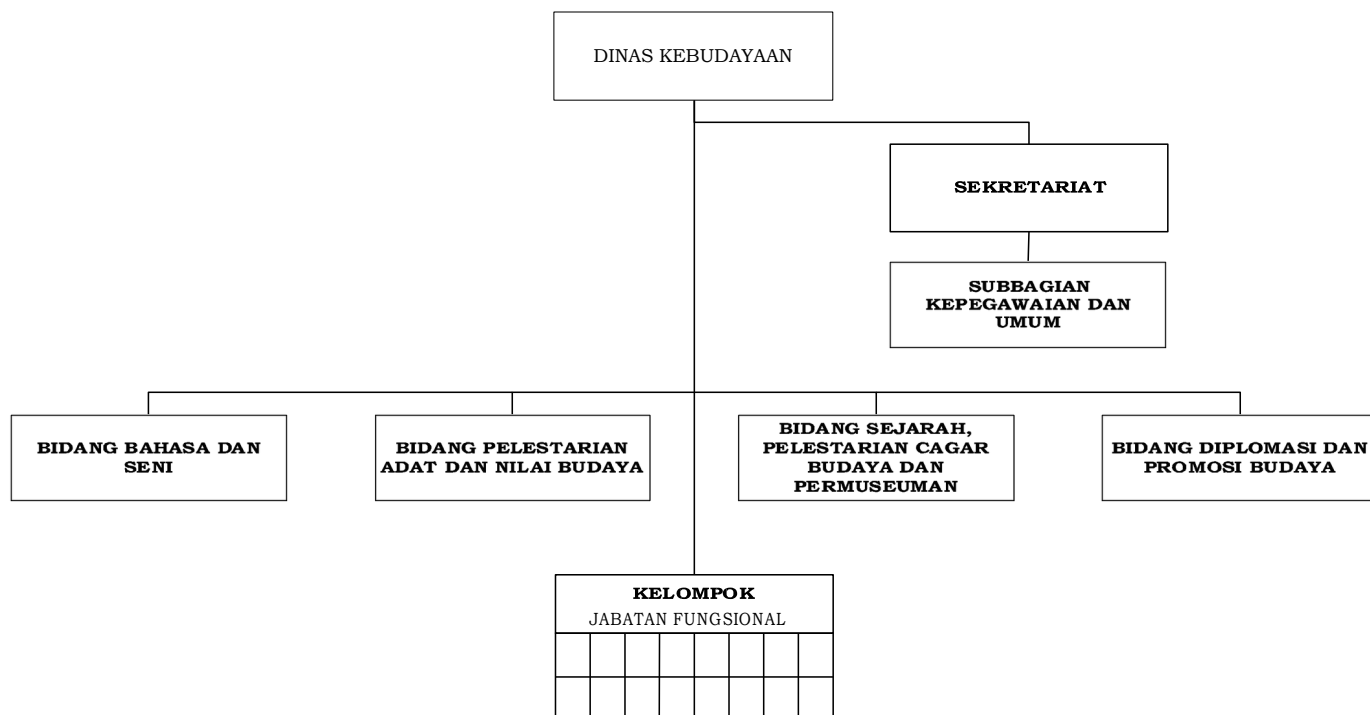
Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional:

7. UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya

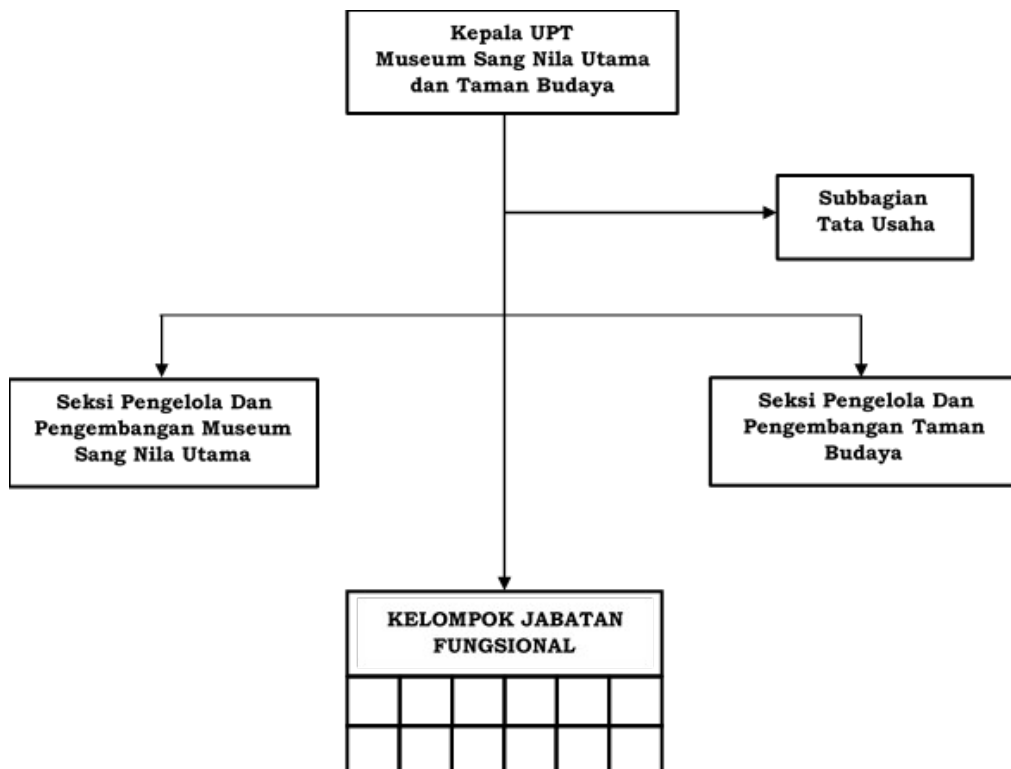
UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan di bidang Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya. Untuk melaksanakan tugas, UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
4. Penyelenggaraan pelayanan Seksi Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau



Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya



B. Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan

Dinas kebudayaan Provinsi Riau di dukung oleh Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan yang berjumlah 112 orang, Adapun rincian sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	58	54	112

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai menurut Eselon

No	Jenis Kelamin	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	1	2	5	8
2	Perempuan	-	-	4	3	7
JUMLAH		-	1	6	8	15

Tabel 1.3 Klasifikasi ASN menurut Golongan

No	Jenis Kelamin	Golongan PNS				Golongan PPPK			Jumlah
		I	II	III	IV	V	VII	IX	
1	Laki-laki	-	4	23	10	15	2	3	58
2	Perempuan	-	1	25	9	12	3	5	54
JUMLAH		-	5	48	19	27	5	8	112

Tabel 1.4 Klasifikasi ASN menurut Pendidikan Formal

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	1	-	20	-	3	21	12	-	58
2	Perempuan	-	-	14	-	4	23	14	-	54
JUMLAH		1	-	34	-	7	44	26	-	112

Tabel 1.5 Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu

No	Unit Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	<i>Pamong Budaya Ahli Madya Kesenian</i>	1	-	1
2	<i>Pamong Budaya Ahli Madya Permuseuman</i>	1	-	1
3	<i>Pamong Budaya Ahli Madya Kesejarahan</i>	1	-	1
4	<i>Pamong Budaya Ahli Muda Nilai Budaya</i>	-	1	1
5	<i>Pamong Budaya Ahli Muda Cagar Budaya</i>	1	-	1
6	<i>Pamong Budaya Ahli Muda</i>	3	2	5
7	<i>Pamong Budaya Ahli Pertama</i>	2	5	7
8	<i>Pamong Budaya Terampil</i>	1	1	2
9	<i>Analisis Kebijakan</i>	1	-	1
10	<i>Perencana Ahli Muda</i>	1	-	1
11	<i>Perencana Ahli Pertama</i>	1	1	2
12	<i>Arsiparis Ahli Pertama</i>	-	1	1
13	<i>Arsiparis Terampil</i>	1	-	1
JUMLAH		14	11	25

Tabel 1.6 Klasifikasi Tenaga Pendukung/Non PNS

No	Tenaga Pendukung/Non Pns	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	<i>Cleaning Service</i>	8	10	18
2	<i>Security</i>	22	-	22
JUMLAH		30	10	40

1.3 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016, Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. Fungsi

Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;*
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;*
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;*
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan*
- e. Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan*
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.*

1.4 Aspek Strategis Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan memiliki peran strategis dalam urusan kebudayaan. Pengoptimalan pelestarian Objek pemajuan kebudayaan merupakan isu penting. Tekanan pusat kebudayaan terletak pada pusat referensi budaya melayu. Kondisi kekinian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak Objek-objek pemajuan budaya melayu yang belum dilestasikan secara optimal. Oleh karena itu optimalisasi pelestarian budaya melayu wajib menjadi pertimbangan kebijakan kedepannya, pelestarian kebudayaan melayu mengedepankan ruang lingkup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan yang merupakan siklus pemajuan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan pemajuan Kebudayaan Melayu Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memfokuskan upaya pada perlindungan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Fokus tersebut diukur melalui indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi dan Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan.

1.5 Permasalahan utama

Permasalahan – permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan hal ini disebabkan karena:

1. Pelestarian Warisan Budaya dan Sejarah Belum Optimal

- 1) Derasnya arus globalisasi dan kapitalis menyebabkan tergerusnya nilai-nilai budaya*
- 2) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum tersaring sehingga manfaatnya belum dirasakan untuk kemajuan Kebudayaan*
- 3) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya*
- 4) Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan untuk pembinaan karakter dan budi pekerti*
- 5) Kurangnya sarana dan prasana pelestarian (Identifikasi, Inventarisasi, Pengkajian, Penggalan dan Pembinaan), pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan*

- 6) Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan yang berkompeten belum memadai
- 7) Belum optimalnya cakupan perlindungan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang disebabkan oleh keterbatasan data, dokumentasi, sumber daya manusia kebudayaan, serta dukungan sarana dan prasarana pelestarian budaya.

Masih banyaknya warisan budaya dan sejarah yang hilang, dicuri dan diakui oleh pihak lain, hal ini merupakan gejala minimnya peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya dan sejarah. Basis Data dalam hal warisan budaya dan sejarah yang belum jelas membuat pemerintah provinsi kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya dan sejarah.

2. Hilang dan Memudarnya Karakter Budaya Melayu sebagai Jati Diri.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang bergerak cepat, memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbudaya. Dunia seakan tanpa batas segala sesuatu dapat diakses dengan mudahnya, sering kali kemudahan tersebut memudahkan pemahaman nilai-nilai luhur budaya, sehingga kita tidak mampu lagi memfilter dan memilah mana yang budaya jati diri bangsa dan mana budaya asing.

3. Promosi, Diplomasi dan dan Pertukaran Budaya yang belum optimal.

Untuk menuju promosi, diplomasi dan pertukaran budaya ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Terbatasnya pengetahuan masyarakat akan kekayaan budaya yang menyebabkan apresiasi tentang budaya masih sangat terbatas, dalam hal ini diplomasi–diplomasi kebudayaan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kebudayaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antar daerah sehingga peran promosi sangat diperlukan.

- c. *Belum adanya Lembaga sertifikasi untuk mengetahui keahlian pelaku budaya sebagai bukti keahlian pelaku budaya yang mengakibatkan terbatasnya pelaku budaya dapat ikut serta dalam even-even budaya yang bersifat internasional.*

4. Peran Pelaku Budaya dalam melestarikan Kebudayaan

Ketergantungan melestarikan kebudayaan masih membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah, inisiasi pelaku budaya belum tersinergi masih dilakukan secara sendiri, di sisi lain pemerintah juga belum optimal dalam melibatkan para pelaku budaya tersebut.

1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024

Adapun tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sakip tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Sudah melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala

b. Perencanaan Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Sudah menyajikan laporan kinerja yang memuat laporan kinerja yang memuat analisis capaian kinerja terhadap sasaran strategis PD;*
- 2) Sudah menyajikan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;*
- 3) Penyajian sistematika Bab II Laporan kinerja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Paraturan Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja*

Instansi Pemerintah.

- 4) *Telah dilakukan penyempurnaan indikator kinerja sasaran strategis melalui penambahan indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi dan Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan guna meningkatkan keterukuran capaian kinerja perangkat daerah.*

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) *Akan melakukan Evaluasi Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh bidang/sub unit;*
- 2) *Akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dilaksanakan secara berkualitas oleh sumber daya dengan pendalaman yang memadai;*
- 3) *Akan memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kebudayaan tahun 2025-2026 dan sumber anggaran yang ada, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

2.1 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

A. Tujuan

*Tujuan strategis Dinas Kebudayaan tahun 2025-2026 dirumuskan untuk menghasilkan kebudayaan yang andal sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi dan Misi. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2025-2026 adalah **Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau** dengan indikator persentase pemajuan budaya melayu Riau.*

B. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan upaya pelindungan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, pengkajian, pengembangan, serta pembinaan terhadap pelaku dan lembaga budaya. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah:

a. Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi;

b. Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan.

2. Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya, pengembangan seni budaya, serta pemanfaatan ruang ekspresi budaya sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan daerah. Indikator yang digunakan adalah: Nilai Ekspresi Budaya.

3. Meningkatnya Warisan Budaya Melayu

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya benda maupun tak benda yang menjadi identitas budaya Melayu Riau. Indikator yang digunakan adalah: Nilai Warisan Budaya.

4. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Indikator yang digunakan adalah: Nilai SAKIP

*Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau*

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Setiap Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
					Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Persentase pemajuan Budaya Melayu Riau		Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	18,18%	27,27%	36,36%	45,45%	54,54%
			Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi	-	-	-	-	82,50%
				Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan	-	-	-	-	12,00%
			Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya (%)	22,31%	25,39%	23,24%	49,20%	47,69

			Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya (%)	47,47%	51,75%	50,24%	55,46%	57,40
			Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip (%)	-	-	-	64,65%	65,55%

C. Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Setiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan kebudayaan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari setiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi pemahaman pluraritas sosbud dalam masyarakat (membangun harmoni sosial, toleransi, dan kesatuan dalam keanekaragaman; Pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible); karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia; tingginya operasional keragaman seni dan kreativitas karya budaya yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang professional lebih banyak dan berkembangnya promosi dan diplomasi budaya. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar kebudayaan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

D. Arah Kebijakan

*Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis pada setiap tujuan strategis dalam mendukung Misi : **Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing** dicapai dengan menggunakan sebagai berikut:*

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kebudayaan periode dua tahun yang akan datang. Berikut ini akan diuraikan beberapa arah kebijakan. Tabel 2.3 berikut menggambarkan keterkaitan antara strategi umum dan arah kebijakan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang akan ditempuh dalam periode dua tahun kedepan (2025-2026) dan dalam rangka

mewujudkan visi misi dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

<i>VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermatabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu).</i>			
<i>MISI 4 : Mewujudkan Budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu</i>	<i>Meningkatnya pelindungan dan pengembangan Budaya Melayu</i>	<i>Peningkatan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan</i>	1. Meningkatkan Inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan 2. Meningkatkan pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan 3. Meningkatkan pengamanan data objek pemajuan kebudayaan 4. Meningkatkan publikasi data objek pemajuan kebudayaan
	<i>Meningkatnya Ekspresi Budaya</i>	<i>Peningkatan pelindungan dan pengembangan ekspresi budaya melayu</i>	1. Meningkatkan kapasitas lembaga/organisasi budaya 2. Meningkatkan penyelenggaraan event kebudayaan
	<i>Meningkatnya Warisan Budaya</i>	<i>Peningkatan pelindungan dan pengembangan warisan budaya melayu</i>	1. Meningkatkan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
	<i>Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah</i>	<i>Penguatan tata kelola pemerintahan</i>	1. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Meningkatkan Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu	Persentase Budaya melayu Riau Yang dilindungi	82, 50%
			Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	12,00%
		Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	47,69
		Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40
		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip	65,55%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau	20.820.938.621,00	-
2	Program Pengembangan Kebudayaan	9.795.520.980,00	-
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	285.729.919,00	-
4	Program Pembinaan Sejarah	384.254.395,00	-
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.195.207.245,00	-
6	Program Pengelolaan Permuseuman	2.271.579.510,00	-

	Total	35.753.230.670,00	-
--	--------------	-------------------	---

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025–2026 dan menjadi dasar dalam pengukuran serta evaluasi kinerja organisasi.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengalokasikan total pagu anggaran dari APBD sebesar Rp. 35.753.230.670,- pada APBD-P terjadi penurunan anggaran menjadi Rp.34.071.472.014,- dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan 5 (lima) program, terdiri dari 1 (satu) program non urusan dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.165.935.097,- dan 4 (Empat) program urusan wajib non pelayanan dasar, dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.905.536.917,- dimana anggaran tersebut termasuk APBD dan DAK Non Fisik, dengan anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp. 2.216.960.000,- dan APBD sebesar Rp. 11.688.576.917,- yang dilaksanakan oleh bidang dan UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerja utamanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menetapkan sasaran strategis yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kebudayaan daerah yaitu Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Sasaran strategis yang diukur pada Tahun 2025 terdiri dari:

- 1. Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu;*
- 2. Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu;*
- 3. Meningkatnya Warisan Budaya Melayu;*
- 4. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah.*

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	<i>Sangat Baik</i>
2	$76 \leq 90$	<i>Tinggi</i>
3	$66 \leq 75$	<i>Sedang</i>
4	$51 \leq 65$	<i>Rendah</i>
5	≤ 50	<i>Sangat Rendah</i>

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- *Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja*
- *Hasil Sedang : pencapaian /realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal*
- *Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian /realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan*

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pelindungan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, pengembangan dan pembinaan terhadap pelaku maupun lembaga budaya.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui dua indikator kinerja yaitu Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi dan Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan.

1. Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi

Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi kebudayaan.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindung	82,50	82,50	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi mencapai realisasi sebesar 82,50% dari target yang ditetapkan sebesar 82,50%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Baik.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi Objek Pemajuan Kebudayaan, fasilitasi penetapan Warisan Budaya Takbenda, pelestarian nilai budaya Melayu, serta penguatan basis data kebudayaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Faktor pendukung keberhasilan antara lain adanya dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pelestarian budaya Melayu, meningkatnya partisipasi

masyarakat dan pelaku budaya, serta terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia kebudayaan yang memiliki kompetensi teknis, luasnya wilayah pendataan objek budaya, serta keterbatasan anggaran untuk menjangkau seluruh objek pemajuan kebudayaan secara optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi kebudayaan, serta meningkatkan keterlibatan komunitas budaya dalam pelestarian budaya Melayu.

2. Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan

Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melaksanakan upaya pengembangan budaya melalui pengkajian, revitalisasi, penyebarluasan, pembinaan pelaku budaya, pembinaan lembaga budaya serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan	12,00	10,80	90,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan mencapai realisasi sebesar 10,80%

dari target sebesar 12,00%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 90,00% dengan kategori Tinggi.

Meskipun belum mencapai target secara penuh, berbagai kegiatan pengembangan budaya tetap dapat dilaksanakan melalui pembinaan lembaga budaya, fasilitasi pelaku budaya, penyelenggaraan festival budaya, promosi budaya Melayu, serta pengembangan ruang ekspresi budaya di Provinsi Riau.

Faktor pendukung pencapaian indikator ini antara lain tingginya partisipasi komunitas budaya, dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan kebudayaan, serta meningkatnya kolaborasi dengan berbagai lembaga kebudayaan.

Sementara itu, faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target secara optimal antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan, serta belum meratanya pelaksanaan program pengembangan budaya di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Sebagai langkah perbaikan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau akan meningkatkan kolaborasi dengan komunitas budaya, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi budaya, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pengembangan budaya Melayu Riau.

2. Sasaran Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu

Sasaran strategis Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya, memperkuat ekosistem seni budaya, serta memperluas ruang ekspresi budaya sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan Melayu Riau.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Ekspresi Budaya yang merupakan salah satu dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Nilai Ekspresi Budaya menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, pengembangan seni budaya, serta pemanfaatan ruang ekspresi budaya dalam kehidupan masyarakat.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu Tahun 2025 dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya. Indikator Nilai Ekspresi Budaya dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5.i} = \frac{S_{5.1} + S_{5.2} + S_{5.3} + S_{5.4}}{4}$$

$$S_{5.i} = \frac{X_{5.i} - \min(X_{5.i})}{\max(X_{5.i}) - \min(X_{5.i})}, i = 1, 2, 3, 4$$

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian indikator Nilai Ekspresi Budaya

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	47,69	-	-	49,20	36,76	74,80

Sumber Data : Kementerian Kebudayaan RI Tahun 2025

Sampai dengan penyusunan LKjIP Tahun 2025, realisasi indikator Nilai Ekspresi Budaya belum dapat diketahui karena hasil penghitungan resmi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 masih dalam proses pengolahan oleh Kementerian Kebudayaan dan Bappenas. Berdasarkan mekanisme penghitungan nasional, hasil capaian tahun berjalan akan dipublikasikan pada tahun berikutnya setelah seluruh data nasional selesai diverifikasi dan diolah.

Meskipun capaian indikator belum tersedia, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung

peningkatan ekspresi budaya masyarakat, antara lain penyelenggaraan festival budaya, pembinaan komunitas seni budaya, fasilitasi pelaku budaya, pengembangan ruang ekspresi budaya, promosi budaya Melayu Riau, serta pelaksanaan berbagai kegiatan seni pertunjukan dan kebudayaan.

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 indikator Nilai Ekspresi Budaya memiliki target sebesar 49,20 dengan realisasi sebesar 36,76 atau mencapai 74,80%. Hasil tersebut menjadi dasar bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang mendukung penguatan ekspresi budaya masyarakat.

Faktor pendukung pelaksanaan program yang berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Ekspresi Budaya antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan event budaya, serta semakin aktifnya komunitas seni dan budaya dalam berbagai kegiatan pelestarian budaya Melayu.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan kebudayaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas budaya, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau akan terus meningkatkan kolaborasi dengan komunitas budaya, memperluas pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi budaya, meningkatkan pembinaan pelaku budaya, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Ekspresi Budaya Dengan Tingkat Nasional



Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 Indikator Nilai Ekspresi Budaya sebesar 36,76 lebih rendah dari Realisasi Tingkat Nasional sebesar 39,85.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Ekspresi Budaya*

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Pagu	Realisasi Keuangan	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	13.220.810.259	9.975.859.216	75,46%

Pagu anggaran 2025 untuk sasaran Meningkatkan Ekspresi Budaya Melayu dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya sebesar Rp. 13.220.810.259,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.975.859.216,- dan capaian sebesar 75,46%.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1. Program Pengembangan Kebudayaan*
- 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional*
- 3. Program Pengelolaan Permuseuman*

3. Sasaran Meningkatnya Warisan Budaya Melayu

Sasaran strategis Meningkatnya Warisan Budaya Melayu bertujuan

untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan warisan budaya Melayu Riau, baik yang bersifat benda maupun tak benda. Sasaran ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau sekaligus sebagai aset pembangunan daerah.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator **Nilai Warisan Budaya**, yang merupakan salah satu dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai Warisan Budaya menggambarkan tingkat pelestarian dan pengelolaan warisan budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Warisan Budaya Melayu Tahun 2025 dengan indikator Nilai Warisan Budaya. Indikator Nilai Warisan Budaya dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4.i} = \frac{S_{4.1} + S_{4.2} + S_{4.3} + S_{4.4} + S_{4.5} + S_{4.6}}{6}$$

$$S_{4.i} = \frac{X_{4.i} - \min(X_{4.i})}{\max(X_{4.i}) - \min(X_{4.i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Warisan Budaya Melayu dengan indikator Nilai Warisan Budaya sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian indikator Nilai Warisan Budaya

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40	-	-	56,46	55,64	98,54

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudristek RI Tahun 2025

Sampai dengan penyusunan LKjIP Tahun 2025, realisasi indikator Nilai Warisan Budaya belum dapat diketahui karena hasil penghitungan resmi

Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 masih dalam proses verifikasi dan pengolahan oleh Kementerian Kebudayaan dan Bappenas. Oleh karena itu capaian kinerja indikator ini belum dapat diukur pada saat penyusunan laporan.

Walaupun realisasi indikator belum tersedia, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan nilai warisan budaya, antara lain inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, fasilitasi penetapan Warisan Budaya Takbenda, pelestarian cagar budaya, pengelolaan museum, pendokumentasian budaya, serta pembinaan terhadap pelaku dan lembaga budaya.

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2024, indikator Nilai Warisan Budaya memiliki target sebesar 56,46 dengan realisasi sebesar 55,64 sehingga capaian kinerja mencapai 98,54%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan warisan budaya telah berjalan dengan baik dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program Tahun 2025.

Faktor pendukung pelaksanaan program antara lain adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya Melayu, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya, serta terjalinnya kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan kebudayaan.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian warisan budaya, luasnya cakupan objek budaya yang harus dilindungi dan dikelola, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh kebutuhan pelestarian warisan budaya.

Sebagai upaya perbaikan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau akan terus memperkuat inventarisasi dan dokumentasi objek budaya, meningkatkan

koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya Melayu

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025 dengan Indikator Nilai Warisan Budaya dengan Tingkat Nasional belum dapat diukur karena realisasi tahun 2025 belum ada. Sedangkan Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 dengan Indikator Nilai Warisan Budaya dengan Tingkat Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Warisan Budaya Dengan Tingkat Nasional



Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 Indikator Nilai Warisan Budaya sebesar 55,64 lebih tinggi dari Realisasi Tingkat Nasional sebesar 54,93.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Warisan Budaya*

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran
---------	-------------------	----------

		Pagu	Realisasi Keuangan	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	784.726.658	756.590.075	96,41%

Pagu anggaran 2025 untuk sasaran Meningkatnya Warisan Budaya Melayu dengan indikator Nilai Warisan Budaya sebesar Rp. 784.726.658,- dengan realisasi keuangan Rp. 756.590.075,- dan capaian sebesar 96,41%.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Tingkat realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Melayu di Provinsi Riau.

4. Sasaran Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

*Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator **Nilai SAKIP**.*

Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Sakip adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian indikator Nilai Sakip

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip	65,55	-	-	64,65	68,05	-

Target Nilai Sakip untuk tahun 2023 tidak ada dikarenakan pada tahun tersebut Indikator Nilai Sakip belum dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Untuk tahun 2024 target Nilai Sakip 64,65% dan hasil realisasinya 68,05 , sedang kan tahun 2025 target Nilai Sakip 65,55% dan hasil realisasinya belum keluar.

Rincian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Rincian Hasil Evaluasi Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	30	23,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,80	30	16,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,40	15	11,40
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,50	25	68,05
	Nilai Hasil Evaluasi		67,70		68,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 belum ada, sedangkan untuk hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2024 menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan sebesar **0,35** dari tahun 2023 sebesar **67,70** sehingga nilai tahun 2024 menjadi **68,05** dengan predikat **B**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi manajemen kinerja, terutama pada aspek perencanaan, pelaporan, pengukuran dan evaluasi kinerja.

Faktor pendukung peningkatan kualitas SAKIP antara lain komitmen pimpinan terhadap penerapan manajemen kinerja, meningkatnya koordinasi antarbidang dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Adapun kendala yang masih dihadapi antara lain belum optimalnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, masih perlunya penguatan cascading kinerja hingga level individu, serta perlunya peningkatan kualitas analisis dalam dokumen LKjIP.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau akan terus memperkuat implementasi SAKIP melalui penyempurnaan indikator kinerja, peningkatan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi internal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu awal belanja Dinas Kebudayaan dalam DPA SKPD Tahun 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 35.753.230.670-. Pagu tersebut dilaksanakan untuk 5 (lima) program yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya adanya efisiensi anggaran, menyebabkan pengurangan anggaran sehingga pagu Dinas Kebudayaan di APBD-P menjadi Rp. 34.071.472.014,-

Berikut pengalokasian anggaran tahun 2025 pada 5 (lima) program Dinas Kebudayaan serta capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan sesuai dengan laporan pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.3
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Dinas Kebudayaan Tahun 2025



Tabel 3.10
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Dinas Kebudayaan Tahun 2025

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.065.935.097	50,31%
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	10.419.418.559	31,48%
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.111.665.000	3,24%
4.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan	784.726.658	8,67%

	<i>Cagar Budaya</i>		
5.	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	<i>1.689.726.700</i>	<i>6,29%</i>
TOTAL ANGGARAN		34.071.472.014	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Desember 2025

Anggaran Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp. 34.071.472.014,- yang terdapat pada 5 (lima) program di bidang dan UPT seperti terlihat dalam tabel di atas digunakan untuk membiayai 1 (satu) program non urusan dan 4 (empat) program urusan wajib non pelayanan dasar pembangunan kebudayaan.

*Dari pagu anggaran Belanja Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 34.071.472.014,- belanja Gaji dan Tunjangan dengan Anggaran Rp.15.476.577.771,- terserap **96,95 %** dengan realisasi Keuangan sebesar Rp.15.004.239.451,- sedangkan untuk Realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan mampu terserap Rp.14.313.582.286,- dari total anggaran Rp.18.594.894.243,- atau sebesar **76,98 %**, sehingga persentase daya serap anggaran belanja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sampai Desember 2025 adalah Rp.29.317.821.737,- atau sebesar **86,05%** dengan realisasi fisik sebesar **99,02%**. Dengan demikian Capaian kinerja realisasi anggaran adalah sebagai berikut:*

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100\%$	7	8	$9=8/7 \times 100\%$
1	<i>Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu</i>	<i>Nilai Ekspresi Budaya</i>	<i>47,69</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13.220.810.259</i>	<i>9.975.859.216</i>	<i>75,46%</i>
2	<i>Meningkatnya Warisan Budaya Melayu</i>	<i>Nilai Warisan Budaya</i>	<i>57,40</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>784.726.658</i>	<i>756.590.075</i>	<i>96,41%</i>

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun beberapa indikator outcome

masih menunggu hasil pengukuran nasional dari Kementerian Kebudayaan dan Bappenas, seluruh program pendukung tetap dilaksanakan secara optimal guna mendukung pencapaian target pembangunan kebudayaan daerah.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap upaya pelindungan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau, antara lain Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Program Pengelolaan Permuseuman. Mengingat indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi dan Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan merupakan indikator baru yang mulai disajikan pada LKjIP Tahun 2025, maka analisis efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan program-program pendukung yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran tersebut.

Meskipun pada Tahun 2025 terjadi rasionalisasi anggaran yang berdampak pada penyesuaian beberapa kegiatan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tetap mampu mempertahankan capaian indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi sebesar 100,00% dan Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan sebesar 90,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif melalui penetapan prioritas kegiatan, optimalisasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pelibatan komunitas budaya, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan kebudayaan.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga tercermin dari kemampuan organisasi dalam mempertahankan capaian kinerja meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome) memungkinkan berbagai program

pelindungan dan pengembangan budaya tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada Sasaran Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi dan Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang digunakan, namun juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan komunitas dan lembaga kebudayaan. Oleh karena itu, capaian kinerja yang diperoleh merupakan hasil sinergi antara penggunaan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta dukungan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan urusan kebudayaan.

Berikut tabel daya serap anggaran untuk 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPT dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selama tahun 2025.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Kebudayaan Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.065.935.097	18.587.324.306	92,63
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	10.419.418.559	8.680.516.277	83,31
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.111.665.000	111.665.000	10,04
4.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	784.726.658	756.590.075	96,41

5.	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	1.689.726.700	1.183.677.939	70,05
Total Anggaran		34.071.472.014	29.317.821.737	86,05

Realisasi anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 mencapai Rp29.317.821.737 atau sebesar 86,05% dari total pagu anggaran sebesar Rp34.071.472.014.

Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kebijakan rasionalisasi anggaran pada tahun berjalan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki realisasi tertinggi sebesar 92,63% yang menunjukkan dukungan administrasi pemerintahan berjalan dengan baik.

Program Pengembangan Kebudayaan terealisasi sebesar 83,31% dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengembangan budaya Melayu, pembinaan pelaku budaya, serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya memiliki realisasi sebesar 96,41% yang berkontribusi langsung terhadap perlindungan warisan budaya Melayu melalui inventarisasi, pemeliharaan dan pengelolaan objek cagar budaya.

Program Pengelolaan Permuseuman terealisasi sebesar 70,05% dan mendukung upaya pelestarian serta pemanfaatan koleksi museum sebagai media edukasi dan pelestarian budaya.

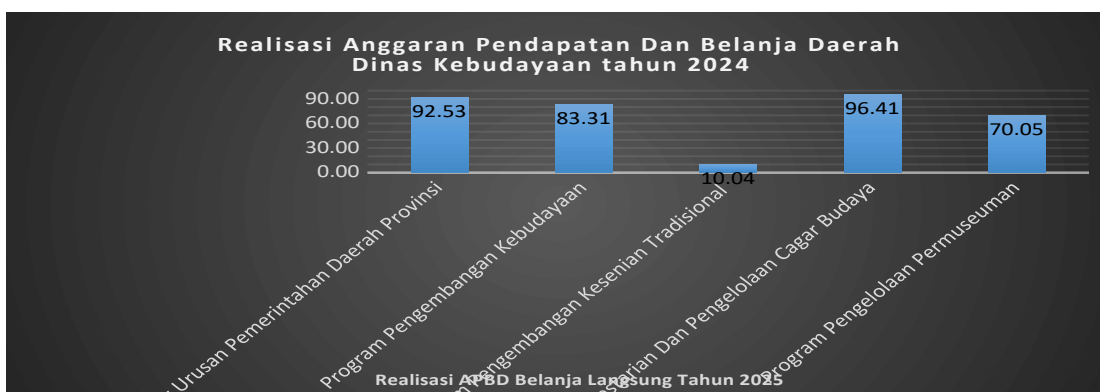
Sedangkan Program Pengembangan Kesenian Tradisional memiliki realisasi sebesar 10,04% yang dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat efisiensi anggaran pada tahun berjalan.

Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 86,05%, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tetap mampu melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya Melayu Riau. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui penyesuaian prioritas kegiatan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan berbasis kolaborasi, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga target-target kinerja utama tetap dapat didukung meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.

Grafik berikut adalah realiasi daya serap APBD per program Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2025.

Grafik 3.4
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Dinas Kebudayaan tahun 2025



Beberapa hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi agar daya serap APBD sesuai atau mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Penja) antara lain adalah:

- 1) *Perencanaan dari program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif dan integratif.*
- 2) *Sumber daya manusia Dinas Kebudayaan belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang memahami tugas dan fungsi dalam hal kaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan OPD.*

Untuk meminimalkan kendala dan hambatan capaian kinerja meningkatnya daya serap APBD sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal dibawah ini dirasa perlu untuk dilakukan:

- 1) *Membuat rencana program dan kegiatan yang lebih realistis, komperhensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya.*
- 2) *Meningkatkan kapasitas dan kompetensi staf Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terkait dengan perencanaan, penganggaran dan keuangan.*

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) bidang kebudayaan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2025 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari enam program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kebudayaan daerah.

*Pada sasaran **Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu**, indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi berhasil mencapai target sebesar 82,50% dengan realisasi sebesar 82,50% atau capaian kinerja sebesar 100,00% (Sangat Baik). Sedangkan indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan mencapai realisasi sebesar 10,80% dari target sebesar 12,00% atau mencapai 90,00% (Tinggi).*

Untuk indikator Nilai Ekspresi Budaya dan Nilai Warisan Budaya, capaian Tahun 2025 belum dapat diukur karena hasil penghitungan resmi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 masih dalam proses pengolahan dan verifikasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Bappenas. Oleh karena itu hasil capaian kedua indikator tersebut akan diketahui setelah publikasi resmi pemerintah pusat.

Pada sasaran Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah, hasil evaluasi Nilai SAKIP Tahun 2025 juga masih menunggu hasil evaluasi resmi dari Tim Evaluator Pemerintah Provinsi Riau

*Tabel 4.1
Rekapitulasi tingkat pencapaian IKU selama Tahun 2024*

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	%
1	2	3	4	5
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	2	100 98,55
II	76% ≤ 90%	Tinggi	-	-
II	66% ≤ 75%	Sedang	1	74,72
IV	51% ≤ 65%	Rendah	-	-
V	< 50%	Sangat Rendah	-	-

Dari aspek pengelolaan keuangan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp29.317.821.737 atau 86,05% dari total pagu anggaran sebesar Rp34.071.472.014. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada tahun berjalan.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah memberikan kontribusi terhadap perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian budaya Melayu Riau serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan daerah.

4.2 LANGKAH STRATEGIS

Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2025 pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026, merupakan dasar berpijak bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dinas Kebudayaan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang, adapun langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau.*
- 2. Meningkatkan Nilai Ekpresi Budaya Melayu Riau.*
- 3. Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya Melayu Riau.*
- 4. Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu.*
- 5. Meningkatkan kolaborasi dengan komunitas budaya, akademisi, dan pemerintah pusat*

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan Tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi akuntabilitas Dinas Kebudayaan di masa-masa yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JAHRONA HARAHAH, S.Sos., MM**

Jabatan : **Pjt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. RAHMAN HADI, M.Si**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR RIAU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR RIAU


Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pihak Pertama,
**Pjt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**


JAHRONA HARAHAH, S.Sos., MM
Pembina Tk I
NIP. 19730105 199403 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	82,50%
		Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	12,00%
	Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekpresi Budaya	47,69
	Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	65,55%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau	20.820.938.621	-
2	Program Pengembangan Budaya	9.795.520.980	-
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	285.729.919	-
4	Program Pembinaan Sejarah	384.254.395	-
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.195.207.245	-
6	Program Pengelolaan Permuseuman	2.271.579.510	-
	Total	35.753.230.670	-

Pekanbaru, 08 Januari 2025


Pj. GUBERNUR RIAU,
Dr. RAHMAN HADI, M.Si


PIL. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU
JAHRONA HARAHAH, S.Sos.,MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19730105 199403 2 002



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. R.E Martadinata Km 15,5 Ciputat, Tangerang Selatan, Banten
Telepon (021) 3062 0100
Laman kemenbud.go.id
Pos-el surat@kemenbud.go.id

Nomor : 6/K/KB.06/2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2024

7 Januari 2026

Yth. Bapak/Ibu

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kebudayaan (daftar nama terlampir)

Di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka mendukung salah satu capaian yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan capaian Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan tahun 2025-2045 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 215/M/2025 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan,



Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.
NIP 196610231990031006

Lampiran surat undangan

Nomor : 6/K/KB.06/2026

Tanggal : 7 Januari 2026

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
17. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
27. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
28. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
30. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
31. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
32. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
35. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua
36. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
37. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan
38. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah



SALINAN

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 215/M/2025
TENTANG
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan alat ukur capaian Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045;
- b. bahwa sebagai alat ukur capaian, Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional termasuk provinsi;
- c. bahwa Kementerian Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan telah melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 sesuai dengan metodologi dan/atau kaidah statistik yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
6. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1129);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut IPK Tahun 2024.
- KEDUA : IPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. IPK Nasional Tahun 2024; dan
 - b. IPK Provinsi Tahun 2024.
- KETIGA : IPK Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
- a. skor IPK Nasional menurut dimensi; dan
 - b. nilai indikator penyusun IPK Nasional.
- KEEMPAT : IPK Provinsi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
- a. skor IPK Provinsi menurut dimensi; dan
 - b. nilai indikator penyusun IPK Provinsi.
- KELIMA : IPK Nasional Tahun 2024 dan IPK Provinsi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM ...

- KEENAM : IPK Nasional Tahun 2024 dan IPK Provinsi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi di Tahun 2024.
- KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kebudayaan yang relevan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan; dan
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kebudayaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal

Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama,



[Handwritten signature]
Ardhien Nissa Widhawati Siswojo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 215/M/2025
TENTANG
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

- A. Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional
1. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Nasional Menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	31.25
D2	Pendidikan	73.41
D3	Ketahanan Sosial Budaya	75.71
D4	Warisan Budaya	54.93
D5	Ekspresi Budaya	39.85
D6	Budaya Literasi	64.40
D7	Gender	57.51
IPK Nasional		59.98

2. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Nasional

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.31
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.15
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	60.93
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	39.52
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	76.41
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	80.14

X3.2 ...

Kode	Nama Indikator	Nilai
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	85.95
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	61.04
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	8.49
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	17.45
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	74.32
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	75.39
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	15.50
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	83.70
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.27
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	21.04
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.47
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	82.28
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	53.09
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	74.25
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.92
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	66.64
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	85.98
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	19.90

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi

1. Provinsi Aceh

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi Menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	15.20
D2	Pendidikan	76.06
D3	Ketahanan Sosial Budaya	73.97
D4	Warisan Budaya	49.32
D5	Ekspresi Budaya	38.89
D6	Budaya Literasi	67.41
D7	Gender	53.76
IPK Provinsi		57.17

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.10
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2.62
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	84.79
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	31.86
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	73.75
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	71.37
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	89.11

X3.3 ...

Kode	Nama Indikator	Nilai
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	61.42
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	3.95
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	17.70
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	75.08
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	70.15
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	14.96
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	64.66
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.70
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	26.86
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	7.11
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	80.71
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	59.71
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	66.33
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	12.90
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	61.50
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	89.93
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	9.86

2. Provinsi Sumatera Utara

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi Menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	17.95
D2	Pendidikan	71.85
D3	Ketahanan Sosial Budaya	77.45
D4	Warisan Budaya	43.26
D5	Ekspresi Budaya	32.40
D6	Budaya Literasi	63.37
D7	Gender	61.27
IPK Provinsi		55.11

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.15
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2.72
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	59.75
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	39.90
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	72.70
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	88.20
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	83.94
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	60.21

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	3.69
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	8.88
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	44.44
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	77.46
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	14.16
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	72.03
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.46
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	8.75
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.45
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	72.10
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	56.75
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	76.47
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	8.31
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	69.48
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	93.34
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	20.99

3. Provinsi Sumatera Barat

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	26.57
D2	Pendidikan	69.80
D3	Ketahanan Sosial Budaya	73.77
D4	Warisan Budaya	69.82
D5	Ekspresi Budaya	38.32
D6	Budaya Literasi	77.63
D7	Gender	60.46
IPK Provinsi		63.44

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.26
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.57
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	68.32
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	30.80
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	74.00
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	78.36
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	83.95
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	59.00

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	37.04
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	21.22
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	94.03
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	78.03
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	20.71
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	71.14
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	2.96
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	12.85
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	11.47
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	82.30
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	60.90
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	76.09
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	17.66
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	69.79
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	104.66
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	11.60

4. Provinsi Riau

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	23.83
D2	Pendidikan	73.37
D3	Ketahanan Sosial Budaya	73.94
D4	Warisan Budaya	55.64
D5	Ekspresi Budaya	36.76
D6	Budaya Literasi	68.69
D7	Gender	53.99
IPK Provinsi		59.00

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.18
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.79
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	76.63
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	33.18
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	71.97
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	83.99
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	83.99
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	53.85

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	11.39
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	32.27
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	56.50
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukan seni	74.26
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	15.28
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	72.09
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.87
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	12.56
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	11.82
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	80.94
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	55.93
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	79.84
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	11.73
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	55.48
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	92.45
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	14.04

5. Provinsi Jambi

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	25.49
D2	Pendidikan	62.60
D3	Ketahanan Sosial Budaya	78.24
D4	Warisan Budaya	57.02
D5	Ekspresi Budaya	35.08
D6	Budaya Literasi	62.01
D7	Gender	52.74
IPK Provinsi		57.32

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.22
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.75
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	59.15
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	29.68
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	64.99
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	83.45
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	89.66
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	61.60

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	1.43
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	27.08
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	90.67
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	80.35
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	12.19
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	79.25
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.65
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	10.69
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	9.51
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	85.40
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	51.68
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	72.89
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	9.97
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	59.47
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	84.18
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	14.58

6. Provinsi Sumatera Selatan

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	23.87
D2	Pendidikan	69.51
D3	Ketahanan Sosial Budaya	77.94
D4	Warisan Budaya	66.53
D5	Ekspresi Budaya	35.98
D6	Budaya Literasi	65.94
D7	Gender	61.65
IPK Provinsi		61.78

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.21
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.41
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	65.06
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	32.25
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	73.90
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	85.57
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	82.63
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	65.60

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	33.60
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	16.67
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	96.86
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	82.40
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	11.72
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	85.91
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	2.35
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	13.80
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	10.99
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	75.90
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	59.08
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	71.92
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.59
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	64.52
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	88.86
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	31.58

7. Provinsi Bengkulu

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	31.84
D2	Pendidikan	67.96
D3	Ketahanan Sosial Budaya	78.67
D4	Warisan Budaya	54.71
D5	Ekspresi Budaya	35.94
D6	Budaya Literasi	65.16
D7	Gender	61.58
IPK Provinsi		59.38

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.17
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	6.03
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	73.37
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	29.76
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	66.00
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	84.24
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	83.37
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	68.39

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	4.74
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	9.48
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	93.14
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	76.47
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	16.53
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	82.98
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.93
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	13.68
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.41
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	85.80
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	58.20
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	72.26
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.23
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	67.85
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	88.33
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	28.57

8. Provinsi Lampung

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	30.12
D2	Pendidikan	69.41
D3	Ketahanan Sosial Budaya	82.26
D4	Warisan Budaya	59.03
D5	Ekspresi Budaya	36.24
D6	Budaya Literasi	63.25
D7	Gender	58.40
IPK Provinsi		60.97

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.25
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.64
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	71.66
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	32.17
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	67.60
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	89.78
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	87.02
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	69.99

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	8.40
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	29.08
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	70.70
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	88.70
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	10.50
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	89.82
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.76
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	12.72
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	11.34
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	80.60
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	52.67
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	74.21
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.22
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	63.75
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	86.44
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	25.00

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	23.70
D2	Pendidikan	59.53
D3	Ketahanan Sosial Budaya	74.16
D4	Warisan Budaya	69.30
D5	Ekspresi Budaya	42.29
D6	Budaya Literasi	71.00
D7	Gender	59.63
IPK Provinsi		60.74

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.20
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.52
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	58.93
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	28.35
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	59.11
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	86.36
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	78.58
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	57.55

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	25.00
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	25.69
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	92.95
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	88.44
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	18.39
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	80.50
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	2.71
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	24.18
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	9.76
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	85.69
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	57.51
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	76.97
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	13.65
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	58.67
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	91.66
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	28.57

10. Provinsi Kepulauan Riau

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	18.09
D2	Pendidikan	64.69
D3	Ketahanan Sosial Budaya	80.17
D4	Warisan Budaya	60.37
D5	Ekspresi Budaya	37.46
D6	Budaya Literasi	78.50
D7	Gender	57.42
IPK Provinsi		60.34

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.19
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2.23
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	66.90
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	29.06
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	64.40
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	94.01
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	79.69
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	66.80

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	46.13
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	23.22
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	33.72
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	77.16
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	13.33
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	74.56
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.01
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	13.38
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	9.57
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	83.50
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	59.75
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	91.20
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	13.13
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	60.83
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	95.22
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	16.22

11. Provinsi DKI Jakarta

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	15.80
D2	Pendidikan	71.77
D3	Ketahanan Sosial Budaya	76.16
D4	Warisan Budaya	54.69
D5	Ekspresi Budaya	33.41
D6	Budaya Literasi	80.76
D7	Gender	60.66
IPK Provinsi		59.29

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.17
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	1.84
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	64.72
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	30.42
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	83.33
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	93.13
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	78.78
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	56.57

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	2.84
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	40.10
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	5.89
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	74.02
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	26.40
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	86.94
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.98
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	8.66
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	7.60
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	86.27
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	65.20
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	90.57
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	12.93
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	62.84
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	86.65
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	32.50

12. Provinsi Jawa Barat

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	28.37
D2	Pendidikan	75.68
D3	Ketahanan Sosial Budaya	69.98
D4	Warisan Budaya	55.98
D5	Ekspresi Budaya	37.53
D6	Budaya Literasi	65.52
D7	Gender	58.72
IPK Provinsi		59.21

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.26
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.01
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	55.80
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	41.03
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	84.89
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	75.69
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	85.29
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	48.95

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	9.95
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	17.87
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	72.88
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukan seni	75.69
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	15.73
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	86.75
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2.98
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	14.57
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	7.97
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	86.77
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	51.12
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	78.11
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	11.47
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	59.86
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	82.57
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	33.71

13. Provinsi Jawa Tengah

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	36.97
D2	Pendidikan	79.50
D3	Ketahanan Sosial Budaya	79.29
D4	Warisan Budaya	59.24
D5	Ekspresi Budaya	43.59
D6	Budaya Literasi	63.28
D7	Gender	58.84
IPK Provinsi		63.89

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.26
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	6.18
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	58.14
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	46.07
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	84.74
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	77.77
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	89.77
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	70.32

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	6.08
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	17.61
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	96.64
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	79.01
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	14.42
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	91.20
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	4.24
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	27.11
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	6.93
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	86.99
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	52.14
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	73.29
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.66
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	72.17
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	82.91
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	21.43

14. Provinsi DI Yogyakarta

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	37.06
D2	Pendidikan	86.00
D3	Ketahanan Sosial Budaya	80.85
D4	Warisan Budaya	74.45
D5	Ekspresi Budaya	44.64
D6	Budaya Literasi	77.08
D7	Gender	63.57
IPK Provinsi		71.04

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.47
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.56
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	61.82
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	54.33
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	85.35
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	83.22
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	91.39
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	67.93

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	30.65
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	36.11
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	90.53
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	78.11
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	18.88
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	90.58
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	6.33
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	19.09
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.54
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	89.20
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	58.85
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	80.58
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	16.82
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	79.97
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	91.19
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	19.57

15. Provinsi Jawa Timur

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	34.79
D2	Pendidikan	82.71
D3	Ketahanan Sosial Budaya	76.71
D4	Warisan Budaya	58.01
D5	Ekspresi Budaya	51.44
D6	Budaya Literasi	60.34
D7	Gender	58.67
IPK Provinsi		63.98

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.31
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.99
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	55.85
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	54.68
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	81.49
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	71.21
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	89.28
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	69.63

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	6.71
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	14.07
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	94.83
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	78.59
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	15.95
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	87.54
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	5.36
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	40.74
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.29
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	85.97
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	48.74
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	70.10
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.45
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	70.09
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	80.93
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	25.00

16. Provinsi Banten

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	23.90
D2	Pendidikan	65.61
D3	Ketahanan Sosial Budaya	67.29
D4	Warisan Budaya	57.33
D5	Ekspresi Budaya	42.91
D6	Budaya Literasi	64.94
D7	Gender	52.15
IPK Provinsi		56.70

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.19
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.70
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	51.17
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	33.99
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	73.55
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	71.71
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	85.58
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	44.59

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	4.77
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	21.92
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	50.41
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	75.19
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	27.31
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	86.98
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	2.80
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	26.82
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	9.84
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	83.06
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	51.28
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	77.81
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	11.05
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	58.95
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	81.23
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	16.28

17. Provinsi Bali

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	62.79
D2	Pendidikan	90.63
D3	Ketahanan Sosial Budaya	78.82
D4	Warisan Budaya	64.23
D5	Ekspresi Budaya	41.40
D6	Budaya Literasi	72.29
D7	Gender	61.21
IPK Provinsi		70.66

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.55
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	9.18
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	74.59
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	54.32
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	85.90
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	81.00
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	85.16
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	70.28

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	3.28
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	27.46
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	86.75
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	73.46
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	25.23
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	91.61
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.54
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	26.67
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	5.24
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	87.60
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	69.52
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	78.89
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	9.95
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	84.15
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	79.91
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	19.57

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	47.10
D2	Pendidikan	69.46
D3	Ketahanan Sosial Budaya	79.39
D4	Warisan Budaya	50.16
D5	Ekspresi Budaya	43.61
D6	Budaya Literasi	63.49
D7	Gender	53.68
IPK Provinsi		60.41

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.56
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.98
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	75.44
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	32.28
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	63.99
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	76.45
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	91.51
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	70.22

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	1.77
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	5.74
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	87.50
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	75.49
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	11.86
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	89.06
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.46
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	23.82
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	12.96
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	78.18
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	49.18
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	68.54
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	13.06
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	78.69
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	75.09
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	7.26

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	15.15
D2	Pendidikan	65.36
D3	Ketahanan Sosial Budaya	81.09
D4	Warisan Budaya	44.69
D5	Ekspresi Budaya	39.96
D6	Budaya Literasi	54.96
D7	Gender	68.40
IPK Provinsi		54.89

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.06
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.21
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	68.26
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	30.59
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	62.41
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	92.32
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	88.33
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	62.62

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0.81
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	8.01
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	61.73
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	60.99
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	15.85
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	82.51
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.90
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	19.79
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	9.35
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	78.99
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	49.26
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	57.63
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	9.41
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	83.12
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	92.08
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	30.00

20. Provinsi Kalimantan Barat

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	17.41
D2	Pendidikan	58.64
D3	Ketahanan Sosial Budaya	77.69
D4	Warisan Budaya	55.48
D5	Ekspresi Budaya	38.09
D6	Budaya Literasi	60.13
D7	Gender	58.90
IPK Provinsi		55.64

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.16
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2.45
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	52.19
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	28.87
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	62.15
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	91.40
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	82.05
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	59.63

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	12.13
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	11.81
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	82.76
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	76.92
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	16.36
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	78.60
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.58
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	20.67
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	9.67
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	80.70
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	51.06
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	73.25
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	8.68
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	62.70
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	86.56
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	27.45

21. Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	25.86
D2	Pendidikan	67.01
D3	Ketahanan Sosial Budaya	81.20
D4	Warisan Budaya	62.41
D5	Ekspresi Budaya	32.97
D6	Budaya Literasi	60.74
D7	Gender	56.20
IPK Provinsi		60.01

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.21
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.93
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	67.17
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	34.64
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	61.28
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	94.14
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	85.72
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	63.74

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	82.24
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	4.78
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	84.21
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	72.21
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	9.31
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	81.88
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	2.52
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	8.48
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	7.67
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	81.87
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	48.76
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	77.80
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	8.78
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	57.34
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	86.25
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	25.00

22. Provinsi Kalimantan Selatan

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	29.52
D2	Pendidikan	61.96
D3	Ketahanan Sosial Budaya	79.92
D4	Warisan Budaya	59.22
D5	Ekspresi Budaya	33.95
D6	Budaya Literasi	67.88
D7	Gender	57.59
IPK Provinsi		59.19

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.23
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.68
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	64.70
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	28.33
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	60.27
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	88.27
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	83.96
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	67.52

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	20.08
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	14.33
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	95.02
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	72.07
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	11.14
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	87.59
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.57
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	15.12
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	6.66
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	82.54
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	58.28
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	75.84
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	11.32
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	65.54
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	82.22
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	25.00

23. Provinsi Kalimantan Timur

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	25.72
D2	Pendidikan	67.54
D3	Ketahanan Sosial Budaya	77.23
D4	Warisan Budaya	39.10
D5	Ekspresi Budaya	33.39
D6	Budaya Literasi	73.42
D7	Gender	54.94
IPK Provinsi		54.73

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.19
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.16
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	57.17
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	34.81
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	71.80
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	92.46
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	77.12
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	62.10

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0.77
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	14.77
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	27.53
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	65.77
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	9.59
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	82.82
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.81
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	11.59
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.15
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	80.50
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	56.57
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	86.33
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.42
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	58.59
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	89.20
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	17.02

24. Provinsi Kalimantan Utara

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	23.87
D2	Pendidikan	57.80
D3	Ketahanan Sosial Budaya	75.62
D4	Warisan Budaya	40.83
D5	Ekspresi Budaya	33.43
D6	Budaya Literasi	63.71
D7	Gender	56.31
IPK Provinsi		51.81

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.24
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.10
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	58.64
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	27.68
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	55.80
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	94.14
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	79.54
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	53.18

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	1.36
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	22.14
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	23.21
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	57.20
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	15.95
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	71.97
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	2.57
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	10.05
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	11.28
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	69.90
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	46.75
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	80.27
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	11.08
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	60.27
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	87.98
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	20.69

25. Provinsi Sulawesi Utara

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	18.16
D2	Pendidikan	60.71
D3	Ketahanan Sosial Budaya	83.34
D4	Warisan Budaya	46.03
D5	Ekspresi Budaya	35.40
D6	Budaya Literasi	54.09
D7	Gender	82.68
IPK Provinsi		55.22

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.11
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.28
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	50.27
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	29.60
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	68.36
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	91.35
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	91.31
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	67.34

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	9.55
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	7.75
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	95.86
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	62.95
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	11.01
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	51.32
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.44
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	20.66
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	6.00
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	81.80
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	43.29
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	70.38
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	7.59
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	60.54
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	105.48
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	87.50

26. Provinsi Sulawesi Tengah

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	20.21
D2	Pendidikan	59.61
D3	Ketahanan Sosial Budaya	78.37
D4	Warisan Budaya	39.47
D5	Ekspresi Budaya	40.18
D6	Budaya Literasi	62.49
D7	Gender	64.14
IPK Provinsi		52.96

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.19
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2.75
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	54.50
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	27.67
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	64.59
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	91.66
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	88.26
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	55.18

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	4.96
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	12.59
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	39.64
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	71.15
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	8.20
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	67.50
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.11
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	20.19
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.55
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	85.65
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	55.78
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	65.13
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.88
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	64.55
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	93.73
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	34.15

27. Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	31.43
D2	Pendidikan	72.36
D3	Ketahanan Sosial Budaya	73.72
D4	Warisan Budaya	48.82
D5	Ekspresi Budaya	35.48
D6	Budaya Literasi	64.71
D7	Gender	63.00
IPK Provinsi		57.73

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.17
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	6.02
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	69.72
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	33.62
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	75.00
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	83.66
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	77.20
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	60.30

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	5.98
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	22.88
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	69.96
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	65.39
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	9.10
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	73.85
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.48
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	19.05
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	6.76
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	82.30
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	51.63
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	71.94
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	12.25
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	63.84
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	92.34
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	32.81

28. Provinsi Sulawesi Tenggara

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	20.70
D2	Pendidikan	67.85
D3	Ketahanan Sosial Budaya	75.69
D4	Warisan Budaya	50.29
D5	Ekspresi Budaya	33.32
D6	Budaya Literasi	63.63
D7	Gender	66.65
IPK Provinsi		56.38

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.07
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.50
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	75.35
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	27.87
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	66.95
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	90.69
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	79.90
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	56.47

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	22.34
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	21.26
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	41.58
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	76.61
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	9.25
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	69.89
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	2.85
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	12.84
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	6.51
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	77.89
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	56.67
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	73.41
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	9.32
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	70.92
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	88.40
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	40.63

29. Provinsi Gorontalo

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	30.13
D2	Pendidikan	55.23
D3	Ketahanan Sosial Budaya	71.62
D4	Warisan Budaya	50.35
D5	Ekspresi Budaya	33.37
D6	Budaya Literasi	66.23
D7	Gender	65.90
IPK Provinsi		54,23

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.24
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.69
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	47.34
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	28.33
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	58.38
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	76.42
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	87.68
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	50.76

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	16.67
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	14.33
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	72.92
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	64.25
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	9.36
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	76.20
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.41
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	19.41
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	7.95
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	69.96
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	56.56
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	67.28
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	12.87
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	65.36
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	114.92
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	32.35

30. Provinsi Sulawesi Barat

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	25.01
D2	Pendidikan	59.72
D3	Ketahanan Sosial Budaya	80.15
D4	Warisan Budaya	47.76
D5	Ekspresi Budaya	40.40
D6	Budaya Literasi	64.77
D7	Gender	59.51
IPK Provinsi		55.91

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.12
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.89
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	58.23
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	29.29
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	58.74
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	91.50
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	82.95
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	65.98

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	3.70
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	13.50
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	67.23
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	68.93
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	11.51
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	83.11
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.62
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	19.24
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	13.24
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	81.30
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	56.99
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	68.09
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	11.42
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	65.69
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	91.21
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	21.62

31. Provinsi Maluku

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	22.22
D2	Pendidikan	59.01
D3	Ketahanan Sosial Budaya	81.21
D4	Warisan Budaya	59.05
D5	Ekspresi Budaya	36.33
D6	Budaya Literasi	55.15
D7	Gender	61.77
IPK Provinsi		57.27

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.32
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	1.65
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	53.12
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	29.90
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	60.60
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	89.24
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	87.25
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	67.14

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	40.77
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	20.59
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	67.08
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	58.68
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	9.30
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	79.27
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.03
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	15.36
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	12.69
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	66.10
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	45.88
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	63.73
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	9.17
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	73.41
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	96.52
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	15.38

32. Provinsi Maluku Utara

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	11.03
D2	Pendidikan	53.91
D3	Ketahanan Sosial Budaya	75.32
D4	Warisan Budaya	57.79
D5	Ekspresi Budaya	31.16
D6	Budaya Literasi	54.37
D7	Gender	64.78
IPK Provinsi		53.19

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.02
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2.66
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	45.32
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	29.27
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	55.17
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	84.44
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	84.10
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	57.42

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	14.55
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	31.03
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	83.59
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	55.93
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	14.67
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	74.15
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	2.40
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	11.48
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.90
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	66.55
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	46.46
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	62.19
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	8.78
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	66.72
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	86.98
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	40.63

33. Provinsi Papua Barat

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	24.80
D2	Pendidikan	51.13
D3	Ketahanan Sosial Budaya	80.92
D4	Warisan Budaya	33.46
D5	Ekspresi Budaya	25.17
D6	Budaya Literasi	47.97
D7	Gender	54.86
IPK Provinsi		47.31

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.13
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.77
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	51.38
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	23.21
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	51.90
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	94.41
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	80.92
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	67.43

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0.00
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	5.36
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	43.76
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	60.22
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	9.71
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	58.31
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	5.00
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	9.31
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	9.29
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	31.99
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	40.78
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	67.15
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	4.69
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	73.45
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	81.76
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	9.38

34. Provinsi Papua Barat Daya

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	26.52
D2	Pendidikan	51.38
D3	Ketahanan Sosial Budaya	74.20
D4	Warisan Budaya	27.81
D5	Ekspresi Budaya	24.32
D6	Budaya Literasi	53.06
D7	Gender	58.39
IPK Provinsi		45.38

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.28
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3.21
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	49.94
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	23.26
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	53.85
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	91.38
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	84.14
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	47.09

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0.00
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	0.00
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	17.56
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	54.69
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	7.41
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	73.48
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	5.51
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	8.73
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	7.54
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	32.36
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	47.92
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	69.37
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	5.46
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	68.71
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	89.81
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	16.67

35. Provinsi Papua

a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	15.78
D2	Pendidikan	50.57
D3	Ketahanan Sosial Budaya	77.61
D4	Warisan Budaya	44.00
D5	Ekspresi Budaya	18.09
D6	Budaya Literasi	61.63
D7	Gender	57.90
IPK Provinsi		49.08

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.14
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2.27
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	46.23
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	23.61
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	54.58
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	87.46
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	86.80
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	58.57

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	36.84
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	6.47
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	13.84
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	65.37
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	12.93
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	61.25
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.56
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	7.66
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	8.10
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	27.25
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	61.59
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	65.24
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	8.19
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	71.45
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	86.87
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	15.38

36. Provinsi Papua Selatan

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	15.56
D2	Pendidikan	48.97
D3	Ketahanan Sosial Budaya	82.32
D4	Warisan Budaya	35.50
D5	Ekspresi Budaya	26.77
D6	Budaya Literasi	44.66
D7	Gender	54.06
IPK Provinsi		46.53

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.15
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2.07
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	43.07
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	23.07
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	54.11
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	92.50
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	88.26
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	66.21

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0.00
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	0.00
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	50.82
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	61.82
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	8.40
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	76.35
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.80
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	8.21
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	13.10
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	34.68
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	50.46
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	51.97
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	2.71
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	72.46
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	80.34
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	9.38

37. Provinsi Papua Tengah

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	10.54
D2	Pendidikan	45.55
D3	Ketahanan Sosial Budaya	67.68
D4	Warisan Budaya	32.04
D5	Ekspresi Budaya	21.25
D6	Budaya Literasi	29.50
D7	Gender	53.17
IPK Provinsi		39.45

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.11
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	1.27
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	36.23
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	23.18
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	51.10
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	73.22
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	88.71
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0.00
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	0.00
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	68.82
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	40.23
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	3.24
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	73.96
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	0.98
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	17.56
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	6.04
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	32.52
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	37.92
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	29.97
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	1.32
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	69.76
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	79.98
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	9.76

38. Provinsi Papua Pegunungan

- a. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	17.46
D2	Pendidikan	43.03
D3	Ketahanan Sosial Budaya	74.82
D4	Warisan Budaya	33.68
D5	Ekspresi Budaya	20.42
D6	Budaya Literasi	11.31
D7	Gender	57.85
IPK Provinsi		39.80

- b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.28
X1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	0.89
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	31.71
X2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru.	22.99
X2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	48.82
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	62.81
X3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	84.32

X3.3 ...

Kode	Nama Indikator	Nilai
X3.3	Persentase rumah tangga yang merasa aman saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah	77.33
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0.00
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	0.00
X4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	94.25
X4.4	Persentase penduduk yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	13.53
X4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	5.33
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	79.07
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
X5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	3.50
X5.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	15.40
X5.3	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	3.13
X5.4	Persentase penduduk yang merasa aman dan diterima saat menampilkan identitas budaya (mengekspresikan budaya) di ruang publik	29.03
D6	Dimensi Budaya Literasi	
X6.1	Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	18.36
X6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	7.35
X6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	0.23

Kode	Nama Indikator	Nilai
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	94.84
X7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	63.32
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	15.38

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama,




Ardhien Nissa Widhawati Siswojo

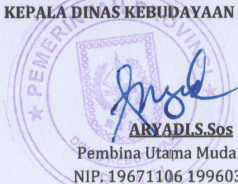
FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
: 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALASAN/SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	IKU berdasarkan Pergub
Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	IKU berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	IKU berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pekanbaru, 2026
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU


ARYADL.Sos
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19671106 199603 1 003

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
: 2025**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	54,54
Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	47,69
Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40

**Pekanbaru, 2026
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**


ARYADI S. Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

FORMULIR REKAPITULASI PENETAPAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	54,54	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengembangan Kebudayaan 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Program Pengelolaan Permuseuman	34.071.472.014
Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	47,69		
Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40		

JUMLAH ANGGARAN : Rp 34.071.472.014
PROGRAM : 5 Program

Plt. GUBERNUR RIAU

SF. HARYANTO

Pekanbaru, 2025
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU



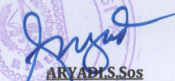
ARYADI S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

FORMULIR PENETAPAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	86 OPK	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	10.419.418.559
	Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	2,24 Persen	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.407.093.559
	Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	2,24 Persen	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	12.325.000
			1 Lembaga	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	5.000.000.000
			100 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.111.665.000
			100 Persen	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.111.665.000
			146 Objek	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	784.726.658
			5 Persen	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	97.174.358
			2 Objek	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	687.552.300
			85 Poin	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.689.726.700
		B Nilai	Pengelolaan Museum Provinsi	1.689.726.700	
TOTAL					14.005.536.917

JUMLAH ANGGARAN : Rp 14.005.536.917
PROGRAM : 4 Program

Pekanbaru, 2026
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

ARYADI S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

FORMULIR REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
: 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	54,54	Program Pengembangan Kebudayaan	10.419.418.559,00	54,54	100
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.111.665.000,00		
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	784.726.658,00		
			Program Pengelolaan Permuseuman	1.689.726.700,00		
Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	47,69	Program Pengembangan Kebudayaan	10.419.418.559,00	-	-
			↳ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
			↳ Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
			↳ Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.111.665.000,00		
			↳ Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/ Kota			
			Program Pengelolaan Permuseuman	1.689.726.700,00		
			↳ Pengelolaan Museum Provinsi			
Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	784.726.658,00	-	-
			↳ Penetapan Cagar Budaya			
			↳ Perlindungan Cagar Budaya			

2026
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Pekanbaru,


ARYAD S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

FORMULIR REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	45,45	Program Pengembangan Kebudayaan	10.419.418.559,00	8.680.516.277	1.738.902.282
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.111.665.000,00	111.665.000	1.000.000.000
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	784.726.658,00	756.590.075	28.136.583
			Program Pengelolaan Permuseuman	1.689.726.700,00	1.183.677.939	506.048.761
Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	47,69	Program Pengembangan Kebudayaan	10.419.418.559,00	8.680.516.277	1.738.902.282
			- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
			- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi			
			- Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.111.665.000,00	111.665.000	1.000.000.000
			- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/ Kota			
			Program Pengelolaan Permuseuman	1.689.726.700,00	1.183.677.939	506.048.761
Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40	- Pengelolaan Museum Provinsi			
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	784.726.658,00	756.590.075	28.136.583
			- Penetapan Cagar Budaya			
			- Pelindungan Cagar Budaya			

JUMLAH ANGGARAN : Rp 14.005.536.917
REALISASI ANGGARAN : Rp 10.732.449.291
PROGRAM : 4 Program

Pekanbaru, 2026
 PIK KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

 ARYADIL Soss
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19671106 199603 1 003